V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal berbentuk perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Penggabungan perusahaan penanaman modal yang dilakukan oleh perseroan tertutup dan perseroan terbuka dapat dilakukan dengan memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang wajib dipenuhi oleh perseroan tertutup dan perseroan terbuka diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Syarat tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan penggabungan, perseroan harus memperhatikan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dari perseroan itu sendiri. Penggabungan diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha lainnya serta penggabungan juga dilarang apabila penggabungan tersebut dianggap akan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penggabungan perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi syarat khusus. Penggabungan perusahaan penanaman modal berbentuk perseroan tertutup yang akan melakukan penggabungan diwajibkan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan dalam Perka BKPM No. 5 Tahun 2013. Syarat tersebut mewajibkan perseroan yang melakukan penggabungan untuk memiliki izin prinsip penggabungan dan izin usaha penggabungan yang dikeluarkan oleh BKPM.

Syarat khusus yang wajib dipenuhi perseroan terbuka diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.G.1. Syarat tersebut mewajibkan direksi perseroan membuat pernyataan tertulis kepada Bapepam-LK dan RUPS yang telah didukung pendapat pihak independen bahwa penggabungan tersebut mementingkan pihak-pihak terkait dari perseroan. Syarat selanjutnya yang wajib dipenuhi ialah bahwa penggabungan tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS yang kemudian direksi perseroan menyampaikan rancangan penggabungan kepada Bapepam-LK untuk disetujui.

2. Penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri baik berbentuk perseroan tertutup maupun perseroan terbuka harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Prosedur yang wajib dijalankan oleh perseroan tertutup ialah prosedur yang diatur dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Prosedur selanjutnya yang wajib dijalankan perseroan tertutup ialah prosedur yang ditetapkan oleh BKPM, yaitu prosedur mendapatkan izin prinsip penggabungan dan izin usaha penggabungan. Prosedur penggabungan perseroan terbuka tidak diatur

dalam UU No. 40 Tahun 2007, melainkan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK. No. IX.G.1. Prosedur tersebut mewajibkan direksi masing-masing perseroan melakukan penjajagan, menyusun rancangan penggabungan yang akan disetujui RUPS, mengumumkan rancangan penggabungan dan memperoleh persetujuan Bapepam-LK.

3. Penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri baik berbentuk perseroan tertutup maupun perseroan terbuka menimbulkan akibat hukum. Pasal 122 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan akibat hukum yang ditimbulkan dari penggabungan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggabungan tersebut ialah bahwa perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang dapat disampaikan peneliti ialah bahwa pembentuk undang-undang diharapkan mengamandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terminologi “karena hukum” terkait pengaturan penggabungan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, seharusnya diubah dengan menggunakan terminologi bahasa hukum yang benar, yaitu diubah dengan “demi hukum”. Selanjutnya, amandemen

juga diperlukan terkait dengan tidak diaturnya pengaturan mengenai prosedur penggabungan perseroan terbuka. Prosedur penggabungan yang diatur dalam undang-undang tersebut seharusnya tidak hanya mengatur mengenai penggabungan perseroan tertutup, namun perlu juga pengaturan mengenai prosedur penggabungan perseroan terbuka.

Prosedur penggabungan perseroan terbuka yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.G.1 seharusnya dapat di akomodir dalam satu kesatuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan tidak hanya sebatas peraturan dari suatu lembaga. Amandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Landasan hukum yang jelas mampu memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik.